

## Pemberdayaan Pranata Sosial Bagi Penumbuhan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat

### *The Empowerment of Social Institutions for the Growth of Community Based Social Welfare Facilities/Organizations*

**Elly Kuntjorowati**

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS), Kementerian Sosial RI,  
Jalan Kesejahteraan Sosial No 1 Nitipuran Yogyakarta Telp (0274) 377265, Fax (0274) 373530, Indonesia,  
E-mail : ellykuntjorowati@gmail.com

diterima tanggal 19 September 2019 direvisi tanggal 30 September 2019 disetujui tanggal 01 November 2019

#### *Abstract*

*In the life of the community, the types of social institutions that exist are relatively diverse and the numbers continue to grow along with the dynamics of the development of the community itself. There are five types of social institutions, namely family, religion, education, economy, and politics. To support the formation of a community-based social welfare facilities (=WKSBM), there needs to be active participation from several social institutions in the community. Therefore the empowerment of social institutions is needed. The research problem proposed is how is the effect of social institutions empowerment on knowledge about WKSBM? How does the empowerment affect knowledge about social welfare issues? How does social institutions empowerment affect organizational skills? What is the effect of social institutions empowerment on the growth of WKSBM? The purpose of this study was to determine the effect of empowering social institutions on knowledge about WKSBM. Knowing the effect of empowering social institutions on knowledge of social welfare issues. Knowing the effects of empowering social institutions on organizational skills. Knowing the effect of empowering social institutions on the growth of WKSBM. The results showed a difference between before and after empowerment. Knowledge of respondents increased especially in terms of knowledge about WKSBM, social welfare, organizational skills, and the growth of social institutions into WKSBM. The results of the analysis conducted using the t-test showed that empowerment was very significant for the growth of WKSBM. The recommendations are mainly addressed to the Ministry of Social Affairs in general and the Directorate General of Social Empowerment in particular that the social infrastructure that grows in many communities is a potential that can be grown into WKSBM, for this reason it is necessary to empower and legalize the Lurah to strengthen the position of the WKSBM that has grown.*

**Keywords: Keywords: empowerment; social institutions; WKSBM**

#### **Abstrak**

Dalam kehidupan masyarakat, jumlah lembaga sosial yang ada relatif beragam dan jumlahnya terus bertambah dengan dinamika perkembangan masyarakat itu sendiri. Ada lima jenis lembaga sosial, yaitu keluarga, agama, pendidikan, ekonomi, dan politik. Untuk mendukung pembentukan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM), perlu ada partisipasi aktif dari beberapa lembaga sosial di masyarakat, oleh karena itu diperlukan pemberdayaan. Masalah penelitian yang diajukan adalah bagaimana pengaruh pemberdayaan terhadap pengetahuan tentang WKSBM? Bagaimana pemberdayaan mempengaruhi pengetahuan tentang masalah kesejahteraan sosial? Bagaimana pemberdayaan mempengaruhi keterampilan organisasi? Apa pengaruh pemberdayaan terhadap pertumbuhan WKSBM? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberdayaan terhadap pengetahuan tentang WKSBM. Mengetahui pengaruh pemberdayaan terhadap pengetahuan tentang masalah kesejahteraan sosial. Mengetahui efek pemberdayaan pada keterampilan organisasi. Mengetahui efek pemberdayaan pada pertumbuhan WKSBM. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan antara sebelum dan sesudah pemberdayaan. Pengetahuan responden meningkat terutama dalam hal pengetahuan tentang WKSBM, kesejahteraan sosial, keterampilan berorganisasi, dan penumbuhan pranata sosial menjadi WKSBM. Hasil analisis dengan menggunakan Uji-t menunjukkan bahwa pemberdayaan sangat signifikan untuk pertumbuhan WKSBM. Rekomendasi terutama ditujukan kepada Kementerian Sosial pada umumnya dan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial pada khususnya bahwa pranata sosial yang banyak tumbuh di masyarakat merupakan potensi yang dapat ditumbuhkan menjadi WKSBM, untuk itu perlu dilakukan pemberdayaan dan legalitas Lurah untuk memperkuat posisi WKSBM yang sudah tumbuh.

**Kata Kunci: pemberdayaan; pranata sosial; WKSBM**

## A. Pendahuluan

Di dalam kehidupan masyarakat, jumlah pranata sosial yang ada relatif beragam dan jumlahnya terus berkembang sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat itu sendiri. Pranata sosial menurut Paulus Wirutomo (2014) adalah sebagai kumpulan nilai dan norma yang mengatur suatu bidang kehidupan manusia. Suyanto dan Bambang Pudjianto (2008) menyatakan, pranata sosial ditinjau dari segi kebudayaan melalui pendekatan *ethnoscience* atau *cognitive anthropology* diartikan sebagai pola bagi tindakan dan tingkah laku manusia yang dilakukan pada suatu tempat. Pengertian tersebut mengandung makna bahwa pranata sosial merupakan budaya yang mengatur kehidupan manusia, karena berisikan seperangkat pengetahuan manusia berkaitan dengan sistem nilai, norma, dan aturan yang diperoleh melalui proses belajar dalam hidup bermasyarakat. Sistem nilai dalam kamus besar bahasa Indonesia didefinisikan sebagai kadar, mutu atau sifat yang penting dan berguna bagi kemanusiaan. Nilai secara keseluruhan adalah konsep umum tentang sesuatu yang dianggap baik, patut, layak, pantas yang keberadaannya diinginkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi pedoman kehidupan bersama. Norma adalah bentuk nyata dari nilai-nilai sosial di dalam masyarakat yang berbudaya, memiliki aturan-aturan, dan kaidah-kaidah, baik yang tertulis maupun tidak. Norma mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Aturan merupakan sekumpulan nilai-nilai, norma-norma serta kebudayaan yang dianggap baik oleh masyarakat. Pranata sosial sebagai budaya dijadikan pedoman berperilaku dan bertindak dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup, dan mereka yang melanggarnya bisa dijatuhi sanksi, misalnya arisan, simpan pinjam, merupakan pranata sosial yang mengikat setiap masyarakat. Selain itu, pranata sosial juga digunakan untuk memahami, merekayasa, dan mendayagunakan sumberdaya yang ada di lingkungan kehidupan setempat.

Selo Soemardjan menyatakan, pranata sosial jika diartikan secara sempit ada yang berbentuk

formal dan informal. Pranata sosial formal biasanya dibentuk atas prakarsa aparat, karena kebutuhan pelayanan yang biasanya keberadaannya didukung baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat ataupun organisasi besar yang bertaraf nasional bahkan internasional. Pranata sosial informal dibentuk atas prakarsa warga setempat berdasarkan atas etnis tertentu, agama, profesi, atau kebutuhan masyarakat tertentu. Sehubungan dengan keragaman pranata sosial informal tersebut Kementerian Sosial dalam beberapa tahun terakhir ini mengarahkan sejumlah program melalui strategi pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan keberadaan pranata sosial informal yang disebut wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat.

Pranata sosial memiliki kekhasan atau keunikan, berikut beberapa ciri pranata sosial: a) memiliki tingkat kekekalan tertentu. b) memiliki satu atau beberapa tujuan. c) memiliki tradisi tertulis ataupun tidak tertulis. d) memiliki lambang atau simbol sebagai ciri khasnya. e) memiliki seperangkat alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan lembaga bersangkutan. f) merupakan suatu sistem pola pemikiran dan pola perilaku yang diwujudkan melalui aktivis hidup bermasyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat terdapat lima jenis pranata sosial, yaitu pranata keluarga, agama, pendidikan, ekonomi, dan politik. Guna mendukung terbentuknya Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), sangatlah diperlukan peranserta aktif dari beberapa pranata sosial yang ada di masyarakat, oleh karenanya diperlukan suatu pemberdayaan. Pemberdayaan diperlukan karena Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) merupakan sistem kerjasama antar keperangkat pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri dari usaha kelompok, lembaga, ataupun jaringan pendukungnya. Wahana ini merupakan jejaring kerja pada kelembagaan sosial komunitas lokal, baik yang tumbuh melalui proses alamiah dan tradisional maupun lembaga yang sengaja dibentuk dan dikembangkan oleh masyarakat pada tingkat lokal.

WKSBM dapat menumbuhkembangkan sinergi lokal dalam pelaksanaan tugas di bidang usaha kesejahteraan sosial. Keberadaan WKSBM, berkaitan sangat erat dengan pranata sosial dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan aktivitas kemasyarakatan untuk mengembangkan usaha kesejahteraan sosial.

Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat menurut Keputusan Menteri Sosial Nomor 42/HUK/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat disebutkan, WKSBM adalah sistem kerjasama antarkeperangkat pelayan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga, ataupun jaringan pendukungnya. Wahana ini merupakan jejaring kerja dari kelembagaan sosial komunitas lokal, baik yang tumbuh melalui proses alamiah dan tradisional maupun lembaga yang sengaja dibentuk dan dikembangkan oleh masyarakat pada tingkat lokal. Keberadaan WKSBM dapat menumbuhkan sinergi lokal dalam pelaksanaan tugas di bidang usaha kesejahteraan sosial. Usaha kesejahteraan sosial yang dimaksud adalah upaya warga masyarakat dalam mewujudkan suatu kondisi yang sejahtera. Berdasarkan Kepmensos tersebut dapat diartikan bahwa pemberdayaan pranata sosial sangat berkorelasi dengan terbentuknya wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, karena WKSBM merupakan sistem kerjasama antarkeperangkat ataupun pranata sosial yang ada di masyarakat seperti RT, PKK, Karang Taruna, Kelompok Pengajian.

WKSBM berkedudukan di lingkungan rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), kampung / banjar / jorong / dusun, desa / kelurahan / nagari, dan atau di suatu wilayah adat. Penumbuhan kelembagaan sosial ini bersifat otonom dalam arti mempunyai hak untuk tumbuh dan berkembang, serta melakukan pengelolaan sendiri. Pengelolaan kegiatan dilakukan dengan prinsip kegotongroyongan, keswadayaan, dan kemandirian.

Program penumbuhan Wahana Kesejahteraan Sosial dimaksudkan: a) agar tercapai ke-

sejahteraan sosial berbasis masyarakat; b) meningkatkan peran warga masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial; c) meningkatkan kepedulian dan kesetiakawanan sosial; d) tumbuhnya kelembagaan penyelenggara kesejahteraan sosial berbasis inisiatif warga masyarakat lokal; e) tumbuhnya jaringan kerja di masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial; f) meningkatnya ketahanan sosial masyarakat dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Pemberdayaan terhadap beberapa pranata sosial yang ada di lingkungan sekitar, terutama agar WKSBM mempunyai struktur organisasi, tim kerja masyarakat (TKM), kelompok kerja (Pokja). WKSBM adalah perekat sejumlah elemen warga masyarakat juga memiliki peran dan fungsi yang sangat mendasar dalam memberikan dukungan pelaksanaan otonomi daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini dilakukan dengan judul Pemberdayaan Pranata Sosial Bagi Penumbuhan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat.

Permasalahan penelitian yang diajukan adalah bagaimanakah pengaruh pemberdayaan terhadap pengetahuan tentang WKSBM? Bagaimanakah pengaruh pemberdayaan terhadap pengetahuan tentang masalah kesejahteraan sosial? Bagaimanakah pengaruh pemberdayaan terhadap keterampilan berorganisasi? Bagaimanakah pengaruh pemberdayaan terhadap penumbuhan WKSBM? Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh pemberdayaan terhadap pengetahuan tentang WKSBM. Mengetahui pengaruh pemberdayaan terhadap pengetahuan tentang masalah kesejahteraan sosial. Mengetahui pengaruh pemberdayaan terhadap keetrampilan berorganisasi Mengetahui pengaruh pemberdayaan terhadap penumbuhan WKSBM.

## **B. Penggunaan Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan *action research* (penelitian aksi). Penelitian aksi adalah suatu metode yang didirikan atas asumsi bahwa teori dan praktik dapat diintegrasikan

dengan pembelajaran dari hasil intervensi yang direncanakan setelah diagnosis secara rinci terhadap konteks masalahnya (Davison, R. M. Martinsons, M. G. Kock N, 2004). Penelitian aksi bertujuan memberikan strategi pemecahan masalah dengan tindakan nyata untuk proses peningkatan dan pengembangan kemampuan dalam mendeteksi ataupun memecahkan masalah (Jhon Elliot. 2011).

Lokasi penelitian berada di Desa Sendang-sari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, dan berikut pertimbangan yang peneliti gunakan. Sejak tahun 2015 Kecamatan Pajangan ditetapkan sebagai laboratorium sosial *outdoor* Babeslitbang Yankesos Kementerian Sosial dalam pemberdayaan perempuan rawan sosial ekonomi (PRSE). Tahun 2016 pemberdayaan lanjut usia produktif, dan tahun 2017 pemberdayaan lima WKSBM melalui peningkatan kapasitas pengelola.

Fokus penelitian adalah kelompok pranata sosial mengimplentasikan kegiatan sosial untuk selanjutnya ditumbuhkan menjadi WKSBM dengan aksi yang direncanakan. Rencana aksi pemberdayaan meliputi materi bimbingan motivasi, bimbingan sosial, dan bimbingan praktik belajar lapangan (PBL) pemberdayaan tersebut dimaksudkan untuk mendorong dan mendukung agar kelompok masyarakat lokal yang bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial ditumbuhkan menjadi WKSBM. Hasil pemberdayaan dapat diketahui dari terbentuknya WKSBM, pengelola paham maksud dan tujuan dibentuknya WKSBM, serta paham WKSBM sebagai lembaga sosial kemasyarakatan yang memberikan pelayanan bagi warga masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di lingkungan setempat.

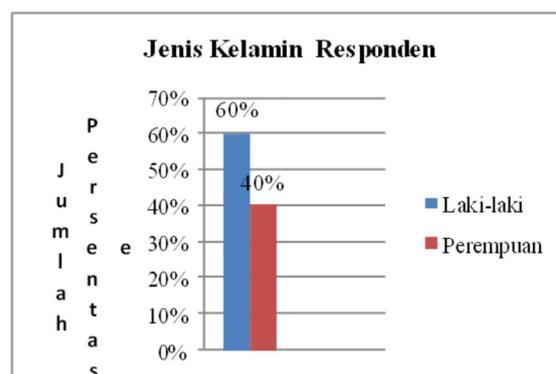
Responden penelitian terdiri dari aparat desa dan tokoh masyarakat, pengurus dan anggota kelompok masyarakat yang bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial dengan jumlah 30 orang. Selain itu, data juga digali dari sumber sekunder mencakup tokoh masyarakat (tokoh formal dan informal), dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dengan wawancara, dan *focus group discussion* (FGD). Analisa data menggunakan t-Test dengan melakukan uji hipotesa yakni hipotesa nihil yang menyatakan tidak ada pengaruh pemberdayaan terhadap penumbuhan WKSBM, serta hipotesa alternatif yang menyatakan ada pengaruh antara pemberdayaan dan penumbuhan WKSBM.

### C. Karakteristik Responden

#### 1. Jenis Kelamin Responden

Sasaran subjek penelitian dilakukan melalui seleksi terhadap beberapa pengurus pranata sosial baik laki-laki maupun perempuan. Melalui diagram berikut ini akan dapat diketahui hasil seleksi terhadap pengurus pranata sosial yang menjadi responden penelitian ini.

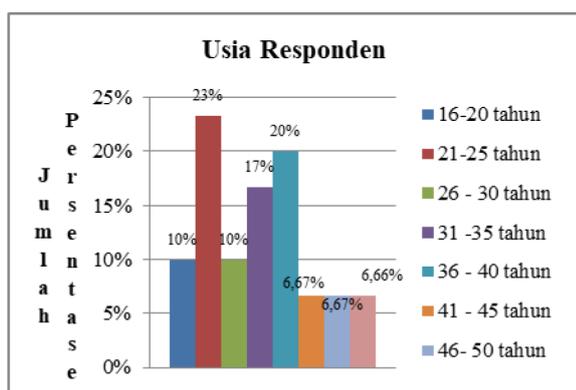


Gambar 1.  
Jenis Kelamin Responden  
Sumber: (Hasil wawancara 2018)

Dari diagram tersebut menunjukkan bahwa berdasar hasil seleksi terhadap beberapa pengurus pranata sosial yang ada di Desa Sendang-sari, yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pemberdayaan dalam rangka pembentukan WKSBM sebagian besar sejumlah 60 persen adalah laki-laki, dan perempuan 40 persen.

#### 2. Usia responden

Usia responden penelitian ini dari hasil seleksi untuk mengikuti pemberdayaan guna penumbuhan WKSBM dapat diketahui sebagai berikut :



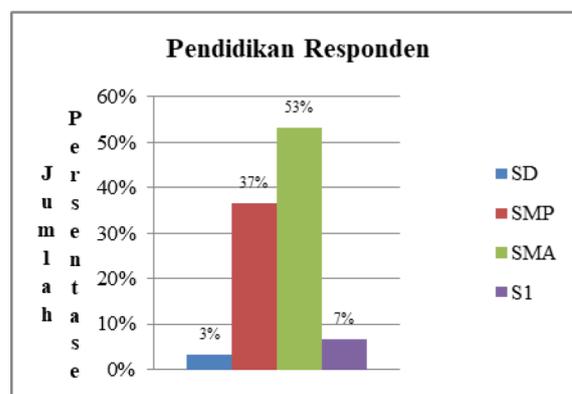
Gambar 2.  
Usia Responden  
Sumber: (Hasil wawancara 2018)

Dari diagram tersebut dapat dimaknai responden berusia 21 hingga 25 tahun merupakan responden terbanyak berdasarkan hasil seleksi untuk dapat mengikuti pemberdayaan dengan jumlah 23,33 persen, merupakan usia cukup produktif yang masih aktif di masyarakat dalam rangka penumbuhan WKSBM untuk mengatasi permasalahan sosial di desa setempat.

### 3. Tingkat Pendidikan Responden

Pendidikan seseorang dapat menggambarkan keluasan pengetahuan, wawasan, dan pandangan serta memadainya keterampilan ataupun keahlian dalam bidang tertentu. Seseorang yang berpendidikan tinggi cenderung lebih mampu memahami dan memecahkan berbagai permasalahan serta lebih terampil mengelola dan melaksanakan tugas kehidupan. Jenjang pendidikan sasaran subjek penumbuhan WKSBM dalam penelitian ini, tingginya pendidikan masing-masing subjek ke depan diharapkan mampu menumbuhkan kembangkan WKSBM yang dikelola. Mereka dengan bekal pendidikan yang memadai, diharapkan mampu menumbuhkan kelembagaan sosial tersebut menjadi berkembang dan maju, sehingga berdayaguna

bagi upaya penanganan permasalahan sosial dan pelayanan warga masyarakat yang menyandang masalah kesejahteraan sosial. Melalui diagram berikut dapat diketahui tingkat pendidikan responden.

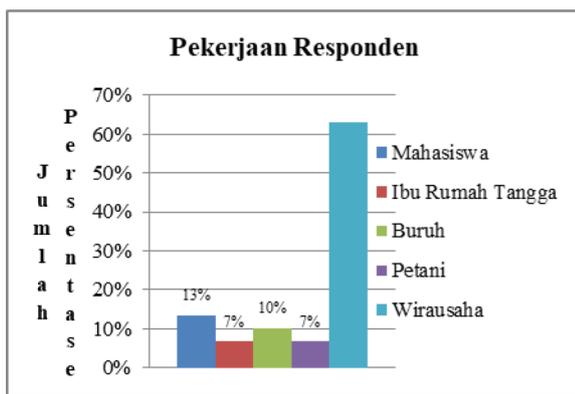


Gambar 3.  
Pendidikan Responden  
Sumber: (Hasil wawancara 2018)

Dari diagram tersebut dapat dimaknai bahwa sebagian besar responden sejumlah 53,33 persen berpendidikan SMA. Pendidikan sangat berpengaruh bagi penumbuhan WKSBM, karena penumbuhan suatu organisasi kemasyarakatan khususnya WKSBM membutuhkan tingkat pendidikan dan keterampilan yang memadai, oleh karenanya diperlukan pemberdayaan untuk meningkatkan pengetahuan tentang organisasi, administrasi dan pengelolaan keuangan.

### 4. Pekerjaan Responden

Bekerja merupakan suatu hal sentral dalam hidup manusia diberbagai kebudayaan, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa setiap budaya memiliki nilai dan konsepsi tersendiri dalam memaknai suatu pekerjaan. Bagaimanapun bekerja merupakan suatu hal yang penting dan signifikan untuk mayoritas orang. Melalui diagram berikut dapat diketahui pekerjaan responden.



Gambar 4.  
Pekerjaan Responden  
Sumber: (Hasil wawancara 2018)

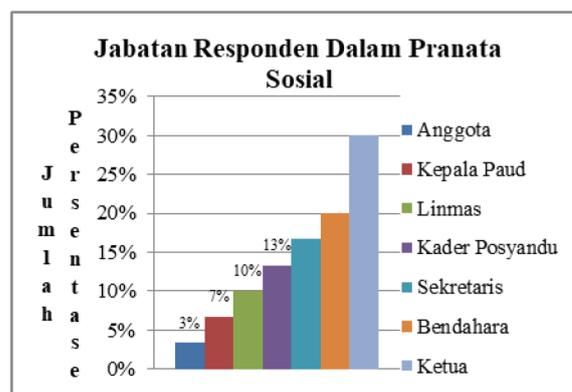
Dari diagram tersebut dapat dimaknai bahwa sebagian besar pekerjaan responden sebagai wirausaha dengan jumlah 63 persen. Pekerjaan mereka relatif beragam meliputi berwirausaha yang berdasar runtutan data sebagian besar menjadi peternak ayam ras, sedang yang lain sebagai petani, menjadi buruh, dan hanya dua orang yang tidak bekerja karena mengurus keluarga sebagai ibu rumah tangga.

Keberadaan data di atas dapat dimaknai, bahwa sasaran subjek penumbuhan WKSBM sebagian besar memiliki pekerjaan yang mapan, sehingga mereka ke depan diharapkan dapat melaksanakan tugas pengabdian secara mantap pada WKSBM yang dikelola. Kemapanan pekerjaan mereka tentu menjadi modal sosial yang sangat mendukung berkembang dan majunya WKSBM yang ditumbuhkan. Kemapanan pekerjaan ini bermakna pula bahwa mereka telah memiliki status sosial secara mantap, yang diharapkan ke depan dapat berpengaruh terhadap kinerja masing-masing dalam menumbuhkembangkan WKSBM. Pengelola pada tahap selanjutnya mampu menggali berbagai potensi sumber kesejahteraan sosial di lingkungan dusun untuk didayagunakan dalam menangani berbagai permasalahan kesejahteraan sosial di wilayah setempat. Sementara keberadaan empat orang subjek penelitian yang masih berstatus mahasiswa patut diapresiasi. Sebagai mahasiswa mereka dengan kesibukan yang luar biasa di bangku kuliah tetap berupaya

untuk berpartisipasi sosial dengan menceburkan diri dalam kelompok yang memiliki kepedulian seperti *yatiman*, *yasinan*, *mayitan*, dan kelompok pengajian yang peduli sosial. Sebagai generasi muda selaku penerus cita-cita bangsa, penghargaan pantas diberikan karena mereka telah menggembleng diri dengan berlatih dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan di dusun setempat.

### 5. Jabatan Dalam Pranata Sosial

Menurut ketentuan yang ada, bahwa pengelola WKSBM dapat berbentuk panitia, tim kerja masyarakat (TKM), pengurus, Pokja, atau sebutan lain sesuai kesepakatan bersama dan kebutuhan. Seseorang yang akan menduduki jabatan pengelola WKSBM selain berjiwa peduli, berdedikasi tinggi, mampu secara fisik, siap mengabdikan, dan mau meluangkan waktu, seyogyanya juga memiliki banyak pengalaman dalam berkecimpung di kelembagaan sosial kemasyarakatan. Melalui diagram berikut dapat diketahui jabatan responden dalam pranata sosial di Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul.



Gambar 5.  
Jabatan Dalam Pranata Sosial  
Sumber: (Hasil wawancara 2018)

Dari diagram tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar responden menduduki jabatan sebagai ketua di pranata sosial yang ada di desanya. Dalam arti mereka telah berpengalaman menduduki jabatan dalam kelembagaan sosial kemasyarakatan. Melalui wawancara da-

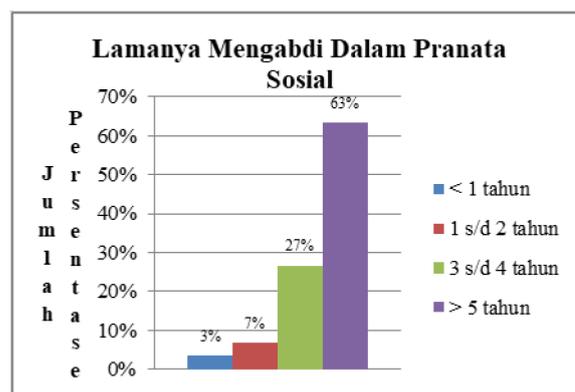
lam pendalaman lanjut diperoleh informasi, bahwa sembilan orang (30,00%) menduduki jabatan ketua, ternyata enam orang sebagai ketua RT, dua orang selaku ketua karang taruna, dan satu orang adalah ketua PKK. Berikutnya lima orang (16,67%) yang menduduki jabatan sekretaris mencakup dua orang sebagai sekretaris karang taruna, dua orang sekretaris PKK, dan satu orang sekretaris Pokgiat LPMD. Mereka yang menjabat bendahara enam orang (20,00%) terdiri dari dua orang bendahara Pokgiat LPMD, dua orang bendahara PKK, dan dua orang bendahara karang taruna. Sisanya 10 orang (33,33%) yakni empat orang berpengalaman sebagai kader Posyandu/kesehatan, tiga orang sebagai Linmas, dua orang sebagai ketua PAUD, dan satu orang adalah anggota PKK.

Hasil identifikasi dan seleksi subjek penumbuhan WKSBM ini apabila dilihat dari pengalaman pengabdian mereka di dalam masyarakat, dapat dikatakan telah representatif sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi pengelola WKSBM. Subjek penelitian kiranya layak ditetapkan sebagai calon pengelola dalam penumbuhan WKSBM melalui penelitian ini. Pengalaman mereka berkecimpung dan menduduki jabatan dalam kelembagaan desa tersebut ke depan diharapkan dapat sebagai modal dalam menumbuhkembangkan WKSBM yang dikelola, yakni mampu mengelola kelembagaan sosial tersebut menjadi pilar yang handal dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan menggali berbagai potensi dan sumber untuk didayagunakan dalam menangani masalah kesejahteraan sosial di dusun setempat. Apabila berkondisi demikian, maka WKSBM yang keberadaannya berlandaskan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat tentu berdayaguna dalam menangani dan melayani para penyandang masalah kesejahteraan sosial, utamanya di lingkungan dusun setempat.

## 6. Lamanya Mengabdikan di Masyarakat

Lama pengabdian seseorang di masyarakat cenderung berpengaruh terhadap keluasan wawasan, pengalaman, dan kemampuan mereka

dalam mengelola suatu kelembagaan sosial seperti WKSBM. Penelitian aksi ini juga mengungkap seberapa lama masing-masing subjek penumbuhan WKSBM pernah berkecimpung dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, dan berikut data mengenai perihal tersebut. Melalui diagram berikut akan dapat diketahui.



Gambar 5.

Lamanya Mengabdikan Dalam Pranata  
Sumber: (Hasil wawancara 2018)

Data yang tersaji dalam diagram di atas menunjukkan, bahwa dari 30 subjek penelitian penumbuhan WKSBM ternyata sebagian besar yakni 19 orang (63,33%) telah mengabdikan diri dalam kegiatan sosial kemasyarakatan lebih dari lima tahun. Sisanya delapan orang (26,67%) telah berpengalaman mengabdikan di masyarakat antara tiga hingga empat tahun, dua orang (6,67) telah berkiprah di masyarakat antara satu hingga dua tahun, dan satu orang (3,33%) pengalaman pengabdian di masyarakat kurang dari satu tahun.

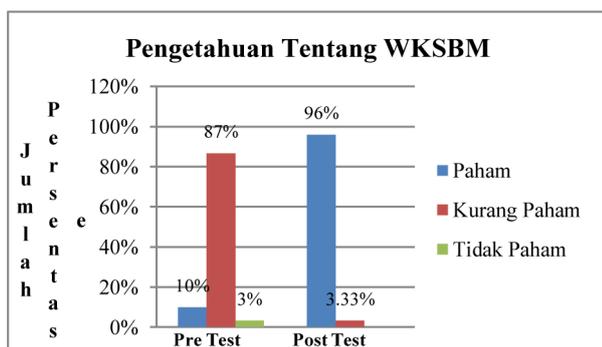
Keberadaan data di atas mendeskripsikan orang-orang yang menjadi sasaran subjek penumbuhan WKSBM telah mengabdikan beberapa waktu pada kegiatan sosial kemasyarakatan. Seseorang mengabdikan pada kegiatan sosial, serta lama tidaknya cenderung memantapkan sikap kepedulian dan kecekatan tindakan dalam menangani permasalahan warga yang kurang beruntung. Kenyataan di lapangan, sebagai hasil identifikasi dan seleksi menunjukkan, bahwa subjek penumbuhan WKSBM dalam penelitian ini sebagian besar relatif telah

lama mengabdikan diri dengan berkegiatan sosial di masyarakat. Kematangan jiwa sosial dan sikap kepedulian mereka diharapkan dapat diimplementasikan dalam mengelola WKSBM yang mereka tumbuhkan. Bermodal kematangan jiwa sosial dan sikap kepedulian, serta bimbingan motivasi dan bimbingan sosial sebagai *treatment* penelitian ini, ke depan diharapkan mampu mengantarkan WKSBM yang dikelola menjadi berdaya. Pengelola mampu menyelenggarakan kesejahteraan sosial, yakni menangani dan memberi pelayanan bagi warga yang mengalami permasalahan kesejahteraan sosial.

#### D. Hasil Pemberdayaan

##### 1. Pengetahuan Tentang WKSBM

Subjek penelitian berjumlah 30 orang berasal dari beberapa kelompok pranata sosial yang memberikan pelayanan sosial, dan merupakan potensi sumber kesejahteraan sosial di Desa Sendangsari. Mereka dipilih karena dipandang berpotensi untuk menumbuhkan WKSBM, bahkan ke depan dimungkinkan menjadi pengelola kelembagaan sosial tersebut. Responden yang telah diberdayakan tersebut perlu untuk diketahui pengetahuan mereka tentang WKSBM baik sebelum maupun sesudah perlakuan, dan. Diagram berikut menggambarkan kondisi tersebut.



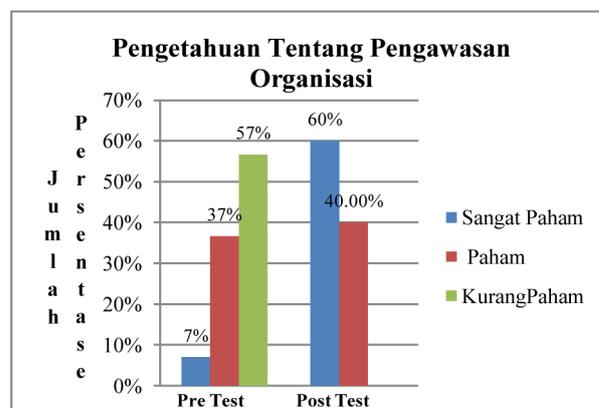
Gambar 5.  
Pemahaman Tentang Pengetahuan WKSBM  
Sumber: (Hasil wawancara 2018)

Dari diagram tersebut dapat diketahui, bahwa sebelum pemberdayaan melalui bimbingan motivasi, bimbingan sosial, dan praktik belajar lapangan dan studi banding, subjek yang

berjumlah 30 orang sebesar 86,67 persen dari mereka ternyata kurang memahami WKSBM sebagai suatu sistem kerja sama antarkeperangkatan pelayanan sosial diakar rumput meliputi usaha kelompok, lembaga ataupun jaringan pendukungnya. Sebagian subjek yakni sebesar 10 persen menyatakan memahami, dan sebagian kecil sebesar 3,33 persen mengaku tidak memahami WKSBM. Setelah pemberdayaan ternyata terjadi peningkatan, bahwa subjek penelitian yang memahami tentang WKSBM sebagai sistem kerjasama antarkeperangkatan pelayanan sosial (KPS) dan jaringan pendukungnya sebesar 96 persen. Mereka ini bahkan memahami, bahwa KPS merupakan terminologi yang digunakan untuk menunjuk pada keperangkatan pelayanan sosial yang menjadi unsur pokok dari WKSBM.

##### 2. Pengetahuan Tentang Pengawasan Organisasi

Pengawasan adalah suatu proses monitoring melalui pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh program organisasi/ kelembagaan sosial dalam konteks ini WKSBM, untuk menjamin agar semua kegiatan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Responden yang telah diberdayakan dapat diketahui perubahan pengetahuannya tentang pengawasan organisasi itu penting. Hal tersebut dapat diketahui melalui diagram berikut.

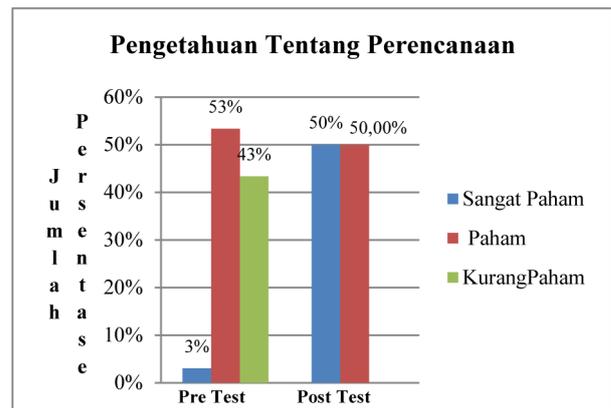


Gambar 6.  
Pengetahuan Tentang Pengawasan Organisasi  
Sumber: (Hasil wawancara 2018)

Memperhatikan data dalam diagram tersebut dapat diketahui, bahwa sebelum dikenai perlakuan berupa bimbingan, lebih dari separo yakni sebesar 56,66 persen subjek penelitian ternyata kurang memahami atau belum mengetahui tentang pengawasan suatu organisasi/kelembagaan sosial sebagai suatu kegiatan yang sangat penting. Data memperlihatkan, baru sebesar 36,66 persen dari mereka yang telah memahami, dan hanya tujuh persen di antara mereka yang sangat memahami perihal tersebut. Setelah dilakukan perlakuan terhadap responden yaitu kelompok masyarakat yang tergabung dalam pranata sosial data secara persentase menunjukkan peningkatan, yakni mereka yang sangat paham menjadi 60 persen dan yang telah memahami perlunya pengawasan suatu organisasi sebesar 40 persen. Dalam wawancara pasca kegiatan perlakuan terhadap responden, seorang peserta bernama Sarwidi mengemukakan, melalui pengawasan, pembukuan keuangan dapat diketahui segala bentuk penyimpangan dan penyelewengan. Informan tersebut menambahkan pandangannya, bahwa pengawasan juga untuk mengevaluasi berbagai kegiatan apa yang sudah dilaksanakan setelah terbentuknya WKSBM.

### 3. Pengetahuan Tentang Perencanaan

Perencanaan kegiatan adalah suatu rangkaian persiapan tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Perencanaan merupakan pedoman secara garis besar dan atau petunjuk pelaksanaan kegiatan yang harus dituruti jika perencana menginginkan hasil yang baik. Melalui diagram berikut dapat diketahui secara lebih jelas pemahaman subjek penelitian tentang perencanaan suatu kegiatan di lihat antara sebelum dan sesudah pemberdayaan.



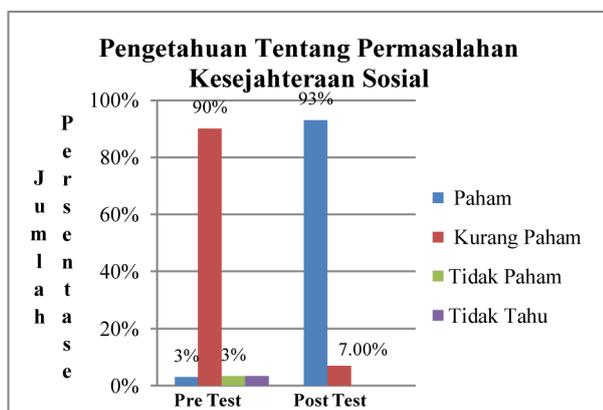
Gambar 7.  
Pengetahuan Tentang Perencanaan  
Sumber: (Hasil wawancara 2018)

Mencermati data pada diagram tersebut dapat diketahui, bahwa sebelum pemberdayaan data menunjukkan ternyata sebesar 53,3 persen subjek penelitian sudah memahami pentingnya perencanaan kegiatan. Data terpapar juga memperlihatkan, sebelum pemberdayaan mereka yang kurang memahami terdapat sebesar 43,33 persen, dan mereka yang sudah sangat memahami pentingnya perencanaan sebesar tiga persen. Setelah pemberdayaan terlihat ada perubahan secara signifikan, subjek yang sangat memahami sebesar 50 persen dan yang memahami juga sebesar 50 persen. Dapat dimaknai bahwa pasca pemberdayaan mereka memahami bahwa dalam suatu perencanaan ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan, antara lain perencana perlu memusatkan perhatian pada kegiatan yang ingin dikerjakan, fokus pada tujuan baik tujuan jangka pendek, menengah, maupun tujuan jangka panjang dari WKSBM yang ditumbuhkan, merencanakan ataupun mengadakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan, serta pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan sosial yang ada di lingkungan setempat.

### 4. Pengetahuan Tentang Permasalahan Kesejahteraan Sosial

Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gang-

guan tidak mampu melaksanakan fungsi sosial secara wajar, akibat dari itu mereka tidak mampu menjalin hubungan secara serasi dan kreatif dengan lingkungan sekitar sehingga tidak dapat memenuhi secara memadai berbagai kebutuhan hidup baik jasmani, rohani, maupun sosial. Hambatan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, ataupun perubahan lingkungan secara mendadak yang kurang mendukung dan tidak menguntungkan. Diagram berikut memperjelas pemahaman subjek penelitian tentang permasalahan kesejahteraan sosial antara sebelum dan sesudah mereka mendapat perlakuan bimbingan.



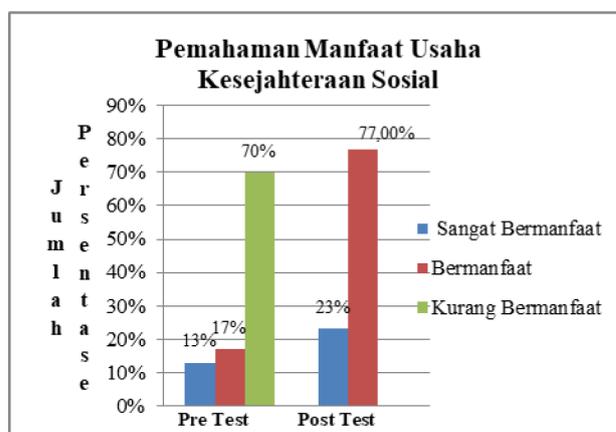
Gambar 8.  
Pengetahuan Tentang Permasalahan Kesejahteraan Sosial  
Sumber: (Hasil wawancara 2018)

Mencermati diagram tersebut dapat diketahui, bahwa sebelum pemberdayaan sebesar 90 persen subjek atau peserta perlakuan kurang memahami tentang permasalahan kesejahteraan sosial. Mereka yang sangat memahami hanya sebesar 3,3 persen, yang memahami baru 3,3 persen, dan yang tidak memahami juga sebesar 3,3 persen. Setelah pemberdayaan bimbingan ternyata terjadi peningkatan pemahaman subjek penelitian, mereka yang memahami menjadi 93 persen, dan yang kurang memahami permasalahan kesejahteraan sosial tinggal tujuh persen. Setelah ada perlakuan ternyata mereka memahami permasalahan sosial khususnya

yang berkaitan dengan 26 penyandang masalah kesejahteraan sosial, diantaranya balita dan anak terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas, gelandangan dan pengemis, tuna susila, anak berhadapan dengan hukum, dan penyalahgunaan Napza. Penumbuhan WKSMB pada lima dusun di Desa Sendangsari dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian warga terhadap permasalahan sosial yang ada di wilayah tersebut, dengan upaya penanganan dan pelayanan secara swadaya dan swakelola.

### 5. Pemahaman Manfaat Usaha Kesejahteraan Sosial

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup secara layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Usaha kesejahteraan sosial adalah upaya meningkatkan kualitas hidup melalui suatu pengelolaan masalah sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, sehingga setiap warga terdorong untuk mencapai kehidupan kearah yang lebih baik. Melalui diagram berikut dapat diketahui secara lebih jelas kondisi pemahaman subjek penelitian tentang kemanfaatan usaha kesejahteraan sosial, antara sebelum dan sesudah pemberdayaan.



Gambar 9.  
Pemahaman Manfaat Kesejahteraan Sosial  
Sumber: (Hasil wawancara 2018)

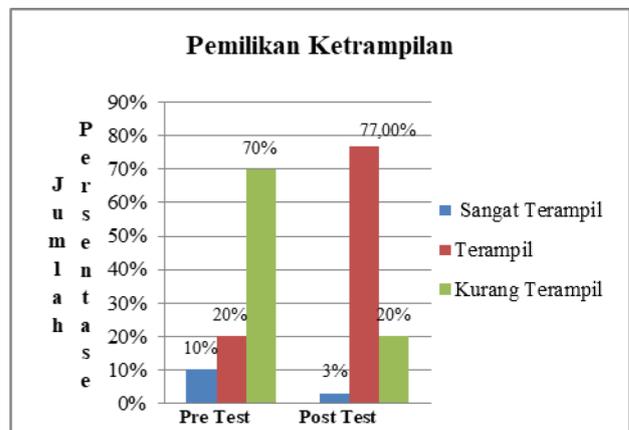
Berdasar data yang disajikan melalui diagram tersebut dapat diketahui, bahwa sebelum pemberdayaan, sebesar 70 persen menyatakan kurang memahami kemanfaatan usaha kesejahteraan sosial, yang memberikan jawaban bermanfaat sebesar 17 persen, dan yang menyatakan sangat memahami, ada 13 persen. Data mengalami perubahan secara positif setelah subjek penelitian memperoleh pemberdayaan karena terjadi peningkatan pola pikir, sehingga di antara mereka 23 persennya menyatakan sangat memahami kemanfaatan usaha kesejahteraan sosial, dan mereka yang menyatakan memahami perihal tersebut menjadi 77 persen, dan yang kurang memahami sudah tidak ada.

Usaha kesejahteraan sosial dalam praktik pekerjaan sosial juga dikenal dengan konsepsi *social service delivery*. Konsepsi ini merupakan panduan kegiatan penyelesaian masalah dengan urutan tahapan meliputi: pengumpulan data, pemetaan masalah, penentuan urgensi dan analisis masalah, pemilihan strategi atau model dan perencanaan penyelesaian masalah, pelaksanaan penyelesaian masalah, dan diakhiri evaluasi hasil kegiatan pelaksanaan penyelesaian masalah. Usaha kesejahteraan sosial sendiri merupakan upaya untuk memenuhi berbagai kebutuhan warga baik kebutuhan fisik, psikis, sosial ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), maupun kebutuhan keimanan dan ketaqwaan (imtaq). Upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut perlu strategi pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang dapat dikelompokkan menjadi sumberdaya manusia, sumberdaya sosial, dan sumber daya alam.

## 6. Kepemilikan Keterampilan

Subjek penelitian diharapkan memiliki kemampuan atau keterampilan berkaitan dengan penumbuhan WKSMB. Kemampuan atau keterampilan yang wajib dimiliki oleh pengelola WKSMB dan anggota antara lain strategi dan cara menggalang dana untuk kegiatan sosial, pengelolaan administrasi, manajemen organisasi, identifikasi masalah sosial, dan pelayanan

kesejahteraan sosial. Berikut ditampilkan data mengenai kondisi penguasaan keterampilan subjek penelitian, antara sebelum dan sesudah pemberdayaan.



Gambar 10.

Pemilikan keterampilan

Sumber: (Hasil wawancara 2018)

Data pada diagram tersebut menunjukkan, bahwa sebelum diberi perlakuan sebesar 70 persen dari 30 subjek penelitian kurang menguasai keterampilan yang dibutuhkan dalam penumbuhan WKSMB. Sebagai contoh kemampuan melakukan usaha kesejahteraan sosial yaitu menyelesaikan permasalahan sosial di lingkungan sekitar, penggalangan dana, dan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS. Subjek penelitian yang mampu dan terampil baru 20 persen, serta yang sangat terampil hanya 10 persen. Setelah mereka diberi perlakuan ternyata terjadi perubahan secara positif, yaitu yang terampil menjadi 77 persen, sangat terampil tiga persen, dan yang kurang menguasai keterampilan untuk menumbuhkan WKSMB menyusut tinggal 20 persen.

## 7. Analisa Uji – t

Analisa data dengan menggunakan uji-t untuk mengetahui perbedaan antara sebelum pemberdayaan dan sesudah pemberdayaan, untuk mengetahui pengaruh variabel X (pemberdayaan) terhadap variabel Y (penumbuhan WKSMB), pengaruh tersebut seberapa besar,

dan untuk mengetahui tingkat signifikansi. Untuk memudahkan perhitungan, peneliti menggunakan program *computer SPSS 23 for windows*.

Melalui tabel berikut akan dapat diketahui lebih jelas pengaruh variabel X (*Dependent Variable*) terhadap variabel Y (*Independent Variable*).

Tabel 1  
 Analisis *One Sample Test* tentang Pemberdayaan Bagi Penumbuhan WKSBM  
 Test Value = 30

Variabel	t	df	sig (2-tailed)	Mean Difference	95 % Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
Pre test	42,24	29	,000	24,67	23,47	25,86
Post test	68,81	29	,000	33,43	32,44	34,43

Sumber : Data hasil wawancara diolah

Analisa uji-t dengan menggunakan *one sample t test* merupakan teknik analisis untuk membandingkan satu variabel bebas (Y) dalam hal ini adalah penumbuhan WKSBM. Teknik ini digunakan untuk menguji apakah nilai tertentu berbeda secara signifikan atau tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Mengacu hasil analisis data pada tabel di atas dapat dinyatakan, bahwa  $N = 30$  yang berarti jumlah responden 30 orang,  $df$  merupakan standar deviasi yang menunjukkan keheterogenan dalam data, dan mean adalah rata-rata secara keseluruhan. *Confidence Interval 95%* adalah salah satu parameter untuk mengukur seberapa akurat mean sebuah sampel mewakili populasi sesungguhnya, artinya jika pengambilan sampel dilakukan 100 kali maka 95 sampel saya mewakili populasi atau dengan kata lain  $t_o > t$  tabel dalam taraf signifikansi 5%. Hipotesa nihil yang diajukan yakni tidak ada pengaruh pemberdayaan pranata sosial bagi penumbuhan WKSBM ditolak, karena to sebesar  $68,81 > t$ -tabel, baik pada taraf signifikansi lima persen  $= 0,361$ , maupun pada taraf signifikansi satu persen  $= 0,463$ . Hipotesis alternatif yang diajukan yakni ada pengaruh pemberdayaan berupa bimbingan sosial terhadap penumbuhan WKSBM diterima, karena hasil menunjukkan taraf signifikansi  $000$  artinya  $p < 0,05$ , yang dapat dimaknai bahwa ada per-

bedaan pemahaman subjek penelitian sebelum dan sesudah diberi perlakuan bimbingan sosial kemasyarakatan, baik pada taraf signifikansi lima persen maupun pada taraf signifikansi satu persen, karena signifikansi  $000 < 0,01$ . Dengan demikian dapat ditegaskan, bahwa pemberdayaan bimbingan sosial berpengaruh secara signifikan bagi penumbuhan WKSBM. Hasil tersebut dapat menjadi pijakan, bahwa setelah pemberdayaan subjek penelitian mampu menyusun rencana dan aksi kegiatan. Selain itu, mereka juga mampu menjalin jejaring kerja dengan organisasi lain, serta mampu menggali dan mendayagunakan PSKS yang ada di Desa Sendangsari. Kemampuan subjek penelitian ini tentunya berdampak pada peran WKSBM yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar, terutama dalam hal pelayanan PMKS dengan mendayagunakan PSKS yang ada di daerah setempat.

### 8. Pranata Sosial yang Tumbuh Menjadi WKSBM Pasca Pemberdayaan

Beberapa pranata sosial yang terpilih mengikuti pemberdayaan dan telah berhasil tumbuh menjadi Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat di Desa Sendangsari sebagai berikut.

Tabel 2  
Pranata Sosial Yang Tumbuh Menjadi WKSBM

No	Dusun	Sebelum	Sesudah	Legalitas
1	Dadapbong	Kelompok RT	WKSBM Mugi Barokah	SK Lurah Sendangsari No 43 Tahun 2018
2	Kayen	Kelompok Pengajian Ibu-ibu PKK Kelompok RT	WKSBM Wasilah	SK Lurah Sendangsari No 41 Tahun 2018
3	Kabrokan Wetan	Kelompok PKK Pengajian Bapak-bapak	WKSBM Migunani	SK Lurah Sendangsari No 44 Tahun 2018
4	Kabrokan Kulon	Karang Taruna	WKSBM Ngudi Kamulyan	SK Lurah Sendangsari No 42 Tahun 2018
5	Kunden	Pokgiat LPMD Kelompok pengajian Kelompok RT	WKSBM Sehat Sejahtera	SK Lurah Sendangsari No 40 Tahun 2018

Sumber : Data hasil wawancara diolah

Dari tabel tersebut dapat dimaknai bahwa pranata sosial yang ada di Desa Sendangsari antara lain di Dusun Dadapbong, Dusun Kayen, Dusun Kabrokan Wetan, Dusun Kabrokan Kulon, dan Dusun Kunden, telah mempunyai kepedulian sosial terhadap warga masyarakat sekitar, sehingga tidak begitu sulit membentuk menjadi WKSBM. Pranata sosial yang ada seperti kelompok pengajian, PKK, kelompok RT telah melakukan kegiatan sosial walaupun belum secara nyata terbentuk sebagai wadah yang mempunyai kepedulian sosial seperti WKSBM. Setelah mengikuti pemberdayaan mereka menjadi antusias untuk meningkatkan kepedulian sosial bagi warga di sekitar, dan hal itu diperkuat dengan pemberian SK dari Lurah Desa Sendangsari.

#### D. Penutup

**Kesimpulan.** Dari hasil penyajian dan analisa data dapat disimpulkan bahwa setelah dilakukan pemberdayaan, responden yang merupakan pengurus dan anggota pranata sosial yang ada di Dusun Dadapbong, Dusun Kayen, Dusun Kabrokan Wetan, Dusun Kabrokan Kulon, dan Dusun Kunden, Desa Sendangsari menjadi mengerti dan paham dengan organisasi sosial yang bernama wahana kesejahteraan so-

sial berbasis masyarakat (WKSBM). Mereka menjadi paham bahwa WKSBM merupakan organisasi sosial di akar rumput yang menangani permasalahan sosial yang ada di lingkungan sekitar. Mereka menjadi paham tentang persyaratan sebuah organisasi sosial dan pentingnya penumbuhan WKSBM untuk menyelesaikan permasalahan sosial di lingkungan sekitar. Kemampuan tersebut ditunjukkan dengan terbentuknya beberapa pranata sosial yang telah tumbuh menjadi WKSBM seperti WKSBM dengan penguatan melalui SK Lurah Desa Sendangsari.

**Rekomendasi.** Pranata sosial yang banyak tumbuh di masyarakat merupakan potensi sosial yang dapat ditumbuhkan menjadi wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKS-BM), sehingga lebih terarah untuk menyelesaikan permasalahan sosial di lingkungan sekitar.

Kementerian Sosial pada umumnya dan Ditjen Dayasos pada khususnya, perlu melakukan pemberdayaan kepada masyarakat terutama untuk menumbuhkan WKSBM. Pemberdayaan sebaiknya dilakukan dari dan oleh masyarakat sehingga pihak yang berkompeten berfungsi sebagai fasilitator saja. Legalitas lurah sangat diperlukan untuk memperkuat WKSBM yang sudah tumbuh.

Pranata sosial lain yang sangat banyak di masyarakat sebaiknya juga diberdayakan terutama pengetahuan tentang WKSBM sebagai organisasi sosial di akar rumput yang akan menangani permasalahan sosial di lingkungannya, sehingga akan termotivasi untuk penumbuhan WKSBM

Pranata sosial yang belum diberdayakan sebaiknya juga diberdayakan tentang permasalahan sosial agar mengerti berbagai masalah kesejahteraan sosial yang ada di desanya. Pemberdayaan tentang keterampilan berorganisasi juga sangat dibutuhkan bagi penumbuhan WKSBM.

### Ucapan Terimakasih

Terimakasih pertama kami sampaikan kepada Kepala B2P3KS yang telah memberikan tugas untuk melakukan *Action Research* terhadap beberapa pranata sosial yang ada di Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, sehingga bisa melakukan penelitian ini. Kedua terimakasih kami sampaikan kepada pihak-pihak terkait seperti Dinas Sosial Kabupaten Bantul, Lurah Desa Sendangsari yang berpartisipasi dan mendukung penelitian ini. Ketiga kepada seluruh responden yang telah bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti pemberdayaan dan bimbingan sosial guna penumbuhan WKSBM. Keempat terimakasih juga kami sampaikan kepada pihak-pihak terkait lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah turut membantu pelaksanaan penelitian ini.

### Pustaka Acuan

Arikunto. (2008). *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: Bumi Aksara.

Davison, R. M., Martinsons, M. G., Kock N. (2004). *Principles of Canonical Action Research*. *Journal: Information Systems Journal*.

Departemen Sosial. (2003). *Kebijakan Operasional Pemberdayaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial.

———. (2004). *Keputusan Menteri Sosial Nomor 42/HUK/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan*

*Pemberdayaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat*. Jakarta: Departemen Sosial.

———. (2008). *Profil Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial.

Epi Supiandi. (2012). *Etika Pekerjaan Sosial*. Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial.

Erna Febru Aries. (2015). *Penelitian Tindakan (Action Research)*. Malang : Gunung Kawi.

Fukuyama (2009). *Social Capital and Civil Society*. Georgia: The Institute of Public Policy, George Mason University.

(<https://www.kemensos.go.id>).

Isbandi Rukminto Adi. (2007). *Perencanaan Partisipatoris berbasis Aset Komunitas/ dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: Fisip UI Press.

Jhon Elliot (2011). *Action Research for Educational Change*. Great Britain. Biddles Ltd(WKSBM). Jakarta : Direktorat pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat.

Luthan,F.2005. *Organizational Behavior*. New York: Mc Graw Hill.

Madya, S. (2006). *Teori dan Praktik Penelitian Tindakan (Action Research)*. Bandung: Alfabeta.

Moleong J Lexy (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi revisi. Bandung : Remaja Rusdakarya.

Nicole (2011). *Meningkatkan Kondisi Kerangka Penghapusan Kemiskinan, Peran apakah yang Dapat Dilakukan Oleh Organisasi Lokal*, terjemahan Frederick Ruma. Jakarta: Yakoma/PGI

Paulus Wirutomo (2014). *Makalah Konstruksi Jaringan Pranata Sosial Untuk Penguatan Ketahanan Sosial (Kerangka Konseptual)*. Jakarta: Fisip Universitas Indonesia.

Sugiyono (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Suradi (2012). *Peranan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat dalam Pembangunan Masyarakat (Studi kasus di Sulawesi Utara)*. Jakarta: *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*. Vol. 13. No. 01. 2008.

Suyanto dan Bambang Pudjiyanto (2012). *Profil WKSBM di Kecamatan Tanete Riattang (Studi Kasus di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan)*. Jakarta: *Jurnal Penelitian Pengembangan dan Kesejahteraan Sosial*. Vol 12. No. 01. 2008

Warto, dkk. (2017: *Pemberdayaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat*, Yogyakarta,: B2P3KS Press

Widyanta (2018). *Kerangka Besar Pembangunan Berkelanjutan dan Penumbuhan WKSBM*. Yogyakarta. Makalah disajikan dalam workshop Penumbuhan WKSBM di Labsos B2P3KS, 10 April 2018.

**Acuan Lain**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 *Tentang Kesejahteraan Sosial*.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang *Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta*.

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Otonomi Daerah*.

